

SIARAN PERS

Untuk disiarkan segera

Kebijakan Rokok Murah Picu Lingkaran Kemiskinan pada Anak Jalanan

Jakarta, 15 September 2022 – Hari ini, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) meluncurkan penelitian mengenai “Ancaman Keterjangkauan Produk Rokok pada Anak Jalanan: Studi Kualitatif”. Studi ini menunjukkan bahwa anak jalanan sangat rentan terhadap konsumsi rokok yang mengakibatkan adiksi. Sebagian besar pendapatan harian hasil kerja anak jalanan habis untuk membeli rokok. Akibatnya, anak jalanan perokok tidak hanya mengalami penurunan kondisi kesehatan, tetapi mereka juga terjebak dalam kondisi kemiskinan. Namun, anak jalanan berpikir secara rasional untuk berhenti merokok apabila harga rokok naik 5 kali lipat. Oleh karena itu, kebijakan rokok mahal merupakan solusi yang optimal untuk mengendalikan konsumsi rokok pada anak jalanan. Selain itu, kebijakan pengendalian konsumsi rokok secara non-fiskal tetap perlu dilakukan secara konsisten untuk menekan keterjangkauan rokok.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) mengamanatkan agar negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Amanat ini seakan tidak sejalan dengan peningkatan konsumsi rokok anak yang dapat merenggut hak-hak anak menjadi tidak dapat bertumbuh kembang secara optimal. Data Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas menunjukkan bahwa persentase perokok anak usia 10–18 tahun terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1 % di tahun 2018. Harga rokok yang murah menjadi salah satu pemicu anak menjadi perokok (Dartanto, 2020). Diketahui, harga rokok di Indonesia masih murah dan terjangkau oleh anak-anak, serta masih dijual secara ketengan. Untuk mengatasi kebiasaan merokok di kalangan anak-anak, kebijakan perlu melihat bukti empiris pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pada anak jalanan.

Anak jalanan termasuk kelompok anak yang harus dilindungi karena literasi pendidikan mereka yang tidak memadai dan mereka dihadapkan pada efek berbahaya dari merokok. Potret ancaman perilaku merokok pada anak jalanan disertai dengan kebijakan pengendalian masih jarang dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, PKJS-UI telah melaksanakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bulan Juni-Agustus 2022 yang bertujuan untuk menganalisis ancaman keterjangkauan produk rokok di kalangan anak jalanan. Pengambilan data berlokasi di Jadedabek (Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Selain anak jalanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembina rumah singgah anak jalanan serta Perwakilan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menjadi informan dalam studi ini.

Risky Kusuma Hartono, Ph.D (Tim Riset PKJS-UI) menyampaikan beberapa poin temuan dalam studi diantaranya:

- 1) **Pendapatan anak jalanan bervariasi** pada rentang **Rp25.000-Rp300.000 per hari**. Namun, **sekitar 25% penghasilan per hari anak jalanan habis digunakan untuk membeli rokok**. Bahkan, terdapat anak jalanan dengan konsumsi lebih dari 1 bungkus per hari;
- 2) Mayoritas **anak jalanan membeli rokok secara batangan/ketengan**. Harga satuan rokok pun sangat murah, yaitu Rp2.000 per batang;
- 3) Mayoritas **informan memiliki persamaan persepsi bahwa harga rokok masih murah di Indonesia**. Kenaikan harga rokok belum menjadikan harga rokok menjadi mahal;
- 4) **Anak jalanan akan berpikir ulang untuk membeli rokok apabila harga rokok menjadi mahal** – Apabila **harga rokok dinaikkan 5 kali lipat dari harga saat ini**, maka harga rokok akan semakin mahal dan semakin berpotensi besar mendorong anak-anak untuk berhenti mengonsumsi rokok;
- 5) **Jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi anak jalanan** merupakan **rokok golongan 1** yaitu rokok dengan tarif cukai yang paling mahal. Namun, **sebagian anak jalanan masih berniat pindah ke produk rokok dengan harga yang lebih murah apabila harga rokok naik**;
- 6) **Edukasi bahaya merokok belum berhasil** membuat anak jalanan berhenti merokok;
- 7) **Efek jangka pendek kondisi ekonomi** akibat dari perilaku merokok yaitu pemborosan, mengurangi pendapatan, dan hanya kegiatan berupa membakar uang. Selain itu, **efek penurunan kondisi kesehatan** yang dirasakan oleh sebagian besar informan anak jalanan yaitu menjadi sering batuk-batuk, lebih mudah mengalami kelelahan, hingga masalah paru-paru.

Dr. Renny Nurhasana (Tim Riset dan Manajer Program PKJS-UI) menambahkan bahwa konsumsi rokok pada anak jalanan dapat mengakibatkan mereka terjebak pada jurang kemiskinan. Ini terjadi karena anak rentan mengalami penurunan produktivitas akibat dari penurunan kondisi kesehatan di masa depan. Studi ini

menyimpulkan bahwa rokok masih sangat mudah dijangkau oleh anak jalanan yang disertai dengan berbagai konsekuensi merugikan.

Oleh karena itu, **studi ini memberikan rekomendasi kebijakan** sebagai berikut:

- 1) **Menaikkan harga rokok melalui mekanisme kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)** agar harga rokok menjadi semakin mahal sehingga lebih tidak terjangkau oleh anak jalanan. **Studi ini mendukung rekomendasi dari Bappenas** agar Pemerintah **menaikkan cukai rokok sebesar 20%** dan **melanjutkan penyederhanaan/simplifikasi strata tarif cukai menjadi 5 strata** untuk dapat mencapai target penurunan prevalensi perokok anak sebesar 8,7% pada 2024.
- 2) **Merevisi Peraturan Pemerintah 109/2012** diantaranya dengan melarang penjualan rokok ketengan agar dapat lebih melindungi anak dari bahaya rokok, serta **menerapkan pelarangan penjualan rokok secara ketengan** agar semakin membatasi akses rokok kepada anak.
- 3) **Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu bekerja sama secara lintas sektor** maupun pihak LSM untuk memperbanyak program, edukasi, dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan menekan perilaku merokok anak jalanan.

Para penanggap dari beberapa Kementerian telah merespons hasil penelitian PKJS-UI hari ini. **Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M. (Asisten Deputi Pengembangan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI)** menyampaikan bahwa saat ini Kemenko Perekonomian sedang menyusun *roadmap* Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam pembatasan konsumsi domestik serta yang diutamakan adalah ekspor hasil produksi tembakau dalam negeri. **Pande Putu Oka Kusumawardani, S.E., M.M., M.P.P., CA (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia/RI)** menjabarkan bahwa hasil tembakau berupa sigaret dalam Undang-Undang Cukai dikategorikan sebagai barang kena cukai yang perlu dikendalikan konsumsinya. Pemerintah pun cukup konsisten menaikkan tarif cukai dari tahun ke tahun untuk menaikkan harga rokok. Selain itu, penyederhanaan struktur tarif cukai rokok sudah dilakukan hingga sekarang mencapai 8 layer. Penyederhanaan ini harapan besarnya adalah mencegah konsumen rokok berpindah ke rokok yang lebih murah, sehingga opsinya menjadi lebih sedikit, kemudian mencegah juga adanya penghindaran rokok ilegal, dan memudahkan administrasi cukai rokok. Pande Putu Oka menekankan bahwa kebijakan cukai ini tetap harus bersinergi dengan kebijakan non-fiskal lainnya.

Penanggap selanjutnya yaitu **Rini Handayani, S.E., M.M. (Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA RI)** mengatakan bahwa upaya KPPPA dalam pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok melalui Kota Layak Anak (KLA) yang salah satu indikatornya yaitu Kawasan Tanpa Rokok dan Iklan, Promosi, dan Sponsorship rokok yang rendah. "Tidak hanya pada KLA, namun hal ini juga didorong melalui pencapaian SDGs yang diterjemahkan pada SDGs Desa yang memiliki target persentase perokok ≤ 18 tahun mencapai 0%. Namun hal ini membutuhkan dukungan dari beberapa pihak untuk pencegahan dan pemulihan," tambah Rini.

Sejalan dengan hal tersebut, **N Susanti Srimulyani, M.Sos. (Ketua Umum Forum Fungsional Penyuluh Sosial Indonesia, Kementerian Sosial RI)** menyampaikan bahwa Kementerian Sosial/Kemensos sangat konsen terkait anak jalanan. Kebijakan teknis dari Kemensos terkait dengan Perlindungan Sosial berbasis keluarga dan komunitas, serta penguatan kapasitas balai rehabilitasi sosial. Dinas sosial provinsi dan kabupaten beserta LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) di berbagai wilayah sangat mendukung upaya pengendalian rokok kepada anak. Semua itu juga tidak lepas dari dukungan peran dari rumah singgah maupun karang taruna. Kajian ini sangat baik dan direspon baik oleh Menteri. "Selain itu, saat ini Kementerian Sosial telah mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 175 tahun 2022 tentang Pengendalian Konsumsi Rokok di Lingkungan Kementerian Sosial RI dimana salah satunya menetapkan pelarangan pembelanjaan dana bantuan sosial (bansos) dalam bentuk rokok untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial," jelas Susanti. Langkah yang diambil oleh Menteri Sosial sangat baik dalam memutus rantai kemiskinan termasuk pada anak jalanan penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Penanggap terakhir yaitu **dr. Benget Saragih, M.Epid (Ketua Tim Kerja Penyakit Kronis dan Gangguan Imunologi, Kementerian Kesehatan RI)** menyampaikan bahwa hasil studi ini dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah untuk meningkatkan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030, sehingga pentingnya meningkatkan penduduk usia produktif dan ini menjadi prioritas utama agar generasi berikutnya sehat dan produktif. "Saya juga meminta dukungan dari semua pihak terutama dalam proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012. PP 109/12 belum cukup efektif dalam menurunkan prevalensi perokok anak, sehingga perlu untuk mengubah substansi dalam menurunkan prevalensi perokok anak," tambah dr. Benget.

Ir. Aryana Satrya, M.M, Ph.D., I.P.U., ASEAN Eng. (Ketua PKJS-UI) menambahkan bahwa mudahnya akses rokok oleh anak jalanan berakibat bukan hanya kesehatan anak jalanan yang terancam, tetapi juga mereka akan tetap terjebak dalam kemiskinan. “Kebijakan rokok mahal melalui mekanisme cukai hasil tembakau (CHT) menjadi salah satu kebijakan yang dapat mengintervensi secara langsung untuk mengendalikan konsumsi rokok, terutama pada anak jalanan. Selain itu, belum adanya regulasi mengenai penjualan rokok ketengan dapat membuat kenaikan CHT tidak akan optimal”, tutup Aryana.

-S E L E S A I-

Kontak:

csgs.pkjs@ui.ac.id

Tentang Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (PKJS-UI): *Institusi yang bergerak pada pelatihan, konsultasi, dan penelitian seputar Jaminan Sosial secara luas termasuk menangani isu ekonomi dan kesehatan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan rakyat (<http://pkjsui.org/> atau <https://bit.ly/DokumenTCPKJSUI>).*